



Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam

P-ISSN : 2621-0312

E-ISSN : 2657-1560

Vol. 6, No. 2 Tahun 2023

DOI : [10.21043/politea.v6i2.23460](https://doi.org/10.21043/politea.v6i2.23460)

Analisis Komparatif Model Dialektika Pos-Islamisme di Dunia Islam antara Arab Saudi dan Iran

Ramdhan Muhaimin

Universitas Al-azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

ramdhan.muhaimin@uai.ac.id

Nizar Umar

Universitas Al-azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

nizar.umar@uai.ac.id

Firda Amaliyah

Universitas Al-azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

firdamlyh@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the relationship between Islam and the state in Saudi Arabia and Iran, using the approach of post-Islamism. Post-Islamism is a concept that refers to the shift of Islamist groups towards modernity and democracy. It was first introduced by Iranian intellectual, Asef Bayat, in the 1990s. Since then, it has been used to analyze the phenomenon of political Islam in different countries, especially after the Cold War. In Saudi Arabia, changes have occurred since Mohammed bin Salman was appointed as crown prince in 2016. In Iran, civil society actions, such as the 2022 death of Mahsa Amini, have driven the change. The research problem is to compare the post-Islamism model that occurs in Saudi Arabia and Iran. The comparative case study method with library research techniques was used. The research findings show that the pattern of post-Islamism in Saudi Arabia differs from that of Iran. In Saudi Arabia, post-Islamism is top-down, starting from state politics without civic movement. However, Iran illustrates the opposite - it is bottom-up and initiated by civil society against the state.

Keywords: Post-Islamism, Democracy, Islamic Politics, Iran, Saudi Arabia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan fenomena pada pola relasi Islam dan negara di Arab Saudi dan Iran, melalui pendekatan teori Pos-Islamisme. Pos-Islamisme secara konseptual adalah perubahan paradigmatik dan gerakan dari kelompok Islamis terhadap modernitas dan demokrasi. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh intelektual Iran, Asef Bayat, yang menganalisis fenomena politik Islam di Mesir dan Iran tahun 1990-an. Konsep ini menjadi diskursus ilmiah yang digunakan untuk menganalisis fenomena politik Islam di berbagai negara, khususnya setelah Perang Dingin. Di Arab Saudi, perubahan-perubahan terjadi sejak Muhammad bin Salman diangkat sebagai putera mahkota kerajaan tahun 2016. Sementara di Iran, perubahan lebih didorong oleh aksi masyarakat sipil (*civil society*) seperti yang terjadi pada kasus kematian Mahsa Amini tahun 2022. Tapi hakikatnya, Pos-Islamisme di Iran sudah berlangsung jauh sebelumnya. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perbandingan model Pos-Islamisme yang terjadi di Arab Saudi dan Iran. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus komparatif dengan teknik studi kepustakaan (*library research*). Temuan penelitian ini adalah pola dialektika Pos-Islamisme di Arab Saudi berbeda dengan Iran. Pos-Islamisme di Arab Saudi bersifat *top-down*, yakni diawali dari politik negara tanpa gerakan sipil. Sementara di Iran menggambarkan sebaliknya, bersifat *bottom-up* yang diinisiasi masyarakat sipil (*civil society*) terhadap negara.

Kata kunci: Pos-Islamisme, demokrasi, politik Islam, Iran, Arab Saudi

Pendahuluan

Lebih kurang satu dekade terakhir, dua negara muslim paling berpengaruh di kawasan Timur Tengah, yaitu Iran dan Arab Saudi mengalami dinamika sosial politik internal yang cukup signifikan. Kedua negara berseberangan secara ideologi dan saling berseteru memperebutkan pengaruh regional (Arsyad, 2022; Hamid & Setiadi, 2021; Umam, 2022). Namun secara internal, terdapat dinamika politik dalam negeri masing-masing yang bersifat sistemik. Dinamika tersebut berhubungan dengan relasi Islam dan kekuasaan, juga relasi Islam dan modernitas.

Di Iran, gelombang kritik terhadap otoritas politik tertinggi yaitu *wilayatul faqih* dipicu oleh protes masyarakat Iran terhadap ketatnya aturan berjilbab bagi kaum perempuan. Salah satu peristiwa yang memicu gelombang demonstrasi mengkritik aturan di Iran adalah perlakuan polisi terhadap Mahsa Amini yang berujung meninggal pada 13 September 2022 lalu (McGrath, 2022). Gelombang protes tersebut berkembang menjadi perlawanan terhadap otoritas *wilayatul faqih*. *Wilayatul faqih* yaitu lembaga keagamaan tertinggi di Iran dengan wewenang mengendalikan sistem pemerintahan (McGrath, 2022). Para demonstiran

tidak saja terdiri atas perempuan, tetapi juga diikuti oleh kelompok masyarakat yang selama ini mengkritisi model pemerintahan yang dianggap konservatif dan eksklusif. Akhirnya, nama “Amini” menjadi simbol perjuangan revolusi modern Iran. Gerakan protes juga berkembang pada komunitas diaspora Iran yang tinggal di luar negeri. Mereka membakar hijab sebagai simbol menyuarakan kebebasan dan perlawanan terhadap rezim pemerintahan konservatif (Jessie Yeung, 2022; McGrath, 2022).

Pemerintah Iran menghadapi situasi yang dilematis. Pada satu sisi, Iran menghadapi ancaman dari dinamika geopolitik regional (Katzman, 2017; Umam, 2022). Di saat yang sama, pemerintah Iran juga harus menghadapi perubahan situasi keamanan dalam negeri akibat demonstrasi yang meluas dan berlangsung terus menerus. Ketidakstabilan dalam negeri ini memberi peluang bagi kekuatan politik lain yang berhaluan reformis dan modernis untuk terus melancarkan kritikan tajam terhadap pemerintahan konservatif Iran yang sudah berkuasa 43 tahun sejak revolusi Islam. Gelombang kritik terhadap pemerintahan revolusi ini sesungguhnya sudah berlangsung sejak tahun 1990-an, terutama ketika Muhammad Khatami dari haluan reformis terpilih menjadi presiden. Setelah itu, Ahmadinejad yang didukung kelompok konservatif merebut kembali kekuasaan pada pemilu berikutnya. Gelombang reformasi di Iran umumnya dibawa oleh tokoh-tokohnya seperti Mir Hosein Mousavi, Ayatullah Montazeri, dan Ayatullah Kazem Shari’atmadari (Argenti, 2018b). Peristiwa “Amini” menjadi momentum kelompok demokratis-reformis tersebut untuk menguatkan suara pembaharuan terhadap sistem politik Iran.

Selain menimbulkan ketidakstabilan politik domestik demonstrasi ini juga telah memakan korban lebih dari 300 orang (Dikarma, 2022). Bahkan tidak berhenti sampai di situ, tim nasional Iran menyuarakan perlawanan dan kebebasan yang sama atas apa yang terjadi tanah air pada perhelatan Piala Dunia di Qatar (Iswara, 2022). Meskipun demikian pemerintah Iran tetapi tidak melakukan perubahan apapun dan fokus untuk mengembalikan kestabilan politik yang terganggu akibat peristiwa ini.

Pola yang lebih kurang mirip juga terjadi di Arab Saudi namun peristiwa dan pendekatan yang berbeda. Perubahan fundamental di Arab Saudi terjadi sejak Muhammad bin Salman diangkat menjadi putra mahkota pada tahun 2017 (Sorongan, 2021).

Pemerintahan Muhammad bin Salman (MBS) mengimplementasikan aturan yang mengundang protes, resistensi. MBS dianggap telah mengeluarkan banyak kebijakan liberalisasi yang menunggalkan nilai konservatisme dan tradisional yang sudah menjadi ciri khas sejak Raja Saud berkuasa. MBS dianggap sedang mempersiapkan menuju visi besar Arab Saudi 2030 (Gardner, 2019; Sandria, 2021). Kebijakannya yang dianggap kontroversial meliputi liberalisasi bagi kaum perempuan, mulai dari kebebasan berhijab, izin berkendara tanpa pendamping, menikah tanpa wali, hingga berkumpul di ruang-ruang publik seperti mall, penyelenggaraan event internasional, bioskop, stadion, dan lain sebagainya (Arbar, 2021; Bernardette Aderi Puspaningrum, 2022). Intelektual Iran Asef Bayat menyebut fenomena yang terjadi di Arab Saudi sebagai Pos-Islamisme (Asef Bayat, 2007a).

Meksipun Arab Saudi dan Iran mengalami gejala Pos-Islamisme dalam pola yang berbeda, tapi ada satu persamaan substansial dinamika yang terjadi pada keduanya yaitu kesamaan yang menunjukkan sebuah upaya untuk ‘melampaui’ dan ‘mengkritisi’ norma-norma Islamisme yang diterapkan di masing-masing negara. Tanpa meninggalkan sama sekali identitas primordial ideologi dan nasional yang sudah melekat, perubahan-perubahan tersebut lebih ingin menegaskan jarak dengan Islamisme. Dalam hal ini, jika sebelumnya Islamisme merupakan bagian daripada identitas dan kepentingan nasional, maka perubahan yang terjadi seperti ingin mengatakan ‘kepentingan nasional lebih utama daripada Islamisme’.

Diskursus Pos-Islamisme dalam literatur-literatur ilmiah dapat ditelusuri melalui penggunaan program *Harzing's Publish or Perish*. Penelitian ini menelusuri kata kunci Pos-Islamisme pada 200 artikel yang diperoleh dari program *Harzing's Publish or Perish* tersebut. Setelah dianalisa menggunakan pemetaan *vosviewer*, peneliti tidak menemukan penelitian komparatif terkait pola relasional Islam dan negara antara Arab Saudi dan Iran dari pendekatan Pos-Islamisme. Dalam “*Making Islam Democracy: Social Movements and The Post-Islamist Turn*” yang diterbitkan Stanford University Press, kemudian diterjemahkan oleh LKiS Yogyakarta menjadi “*Pos Islamisme*”, intelektual Iran Asef Bayat mengatakan fenomena tren Pos-Islamisme bukan eksklusif milik Iran saja (Asef

Bayat, 2007b; Asisian, 2016; Hossain, 2016), tapi juga terjadi seperti di Pakistan (Harmakaputra, 2015), Bangladesh (Hasan & Hasan, 2020; Hossain, 2016), Turki (Rosyad Alfikri et al., 2022; Yilmaz, 2011) dan Indonesia (Argenti, 2018a). Sementara di Arab Saudi, fenomena Pos-Islamisme disebutkan sebagai Post-Salafism (Sinani, 2022).

Pergeseran paradigmatik Islamisme terjadi setelah berakhirnya kekhilafahan Turki Ustmani pada tahun 1924, dimana dalam paradigma politik Islam, sistem kekhilafahan memiliki fungsi sebagai penjaga ideologi keislaman kaum muslimin. Karena itu selama fase kekhilafahan Islam, Islamisme dalam arti keteguhan umat Islam secara keseluruhan terhadap politik Islam sangat kuat. Namun setelah fase ini berakhir, umat Islam dihadapkan pada sistem alternatif yaitu demokrasi. Perdebatan dalam menyikapi sistem alternatif ini menjadi diskursus panjang. Inilah yang dibaca Assef Bayat dalam bukunya tersebut, dengan cara membandingkan Pos-Islamisme di Mesir (gerakan tanpa revolusi) dengan di Iran (revolusi tanpa gerakan).

Gili Argenti dalam jurnalnya “Kelompok Post-Islamisme Pasca Revolusi Islam Iran 1979” merunut pergeseran paradigmatik di Iran dari sekulerisme Shah Reza Pahlevi menjadi islamisme Khomeini, kemudian menuju Pos-Islamisme. Revolusi di Iran tahun 1979 telah menginspirasi gerakan-gerakan Islamisme di berbagai belahan dunia Islam. Namun perkembangan politik yang terjadi di Iran pasca revolusi, khususnya tahun 1990-an memberi warna baru dalam kaitannya hubungan Islamisme dengan Barat, yang kemudian disebut sebagai Pos-Islamisme. Dalam pandangannya, Gili melihat Pos-Islamisme merupakan antitesis dari paradigma Islamisme yang dibangun Khomeini. Paradigma Pos-Islamisme mengarahkan pergerakannya kepada reformasi perekonomian dan demokrasi. Pada saat bersamaan tetap mengkomodasi dan menghormati nilai-nilai pluralisme dalam kehidupan bernegara. Isu formalisasi syari’at Islam nyaris tidak digaungkan sebagai prinsip perjuangan politik. Kelompok Pos-Islamisme lebih menawarkan isu politik yang lebih populis seperti perbaikan pelayanan publik, anti korupsi, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kesetaraan gender (Gili Argenti, 2018).

Revolusi Islam Iran 1979 tidak terjadi disebabkan proses yang cepat dan mendadak, melainkan melalui proses panjang penanaman ideologi oleh ulama-ulama mereka.

Indoktrinasi berkelanjutan itu menghasilkan buah revolusi dengan jatuhnya Shah Pahlevi. Namun pada akhir dekade tahun 1980-an hingga tahun 1990-an benih-benih ketidakpuasaan atas jalannya roda pemerintahan revolusi bermunculan, tokoh-tokoh revolusi seperti Mir Hosein Mousavi, Ayatullah Montazeri, dan Ayatullah Kazem Shari'atmadari yang sebelumnya berdiri di belakang konsep *Wilayatul Faqih* mulai mempertanyakan dominasi yang terlalu kuat institusi Pemimpin Tertinggi Revolusi terhadap lembaga-lembaga politik lain (Gili Argenti, 2018).

Gili Argenti menyimpulkan gagasan Pos-Islamisme yang dikemukakan Asef Bayat. **Pertama**, Pos-Islamisme menunjukkan sikap pragmatis dan realistik, serta terbuka terhadap dinamika politik yang berjalan. Pos-Islamisme menyadari bahwa realitas tak sepenuhnya sesuai dengan idealisme dan sejalan dengan cita-cita ideologis. Pos-Islamisme sama sekali berbeda dengan sekular. Bahkan Pos-Islamisme tetap menggambarkan pertentangannya terhadap bentuk sekularisme, tetapi pada saat bersamaan juga menolak bentuk teokrasi dan beragam platform ideologis-keagamaan dalam bernegara. **Kedua**, Pos-Islamisme bersifat kompromistik. Dengan sifatnya seperti ini, mendorong kelompok Pos-Islamisme mampu beradaptasi dan bahkan menjadi kekuatan alternatif bagi permasalahan demokratisasi di negara-negara muslim.

Mohamad Sulaiman Abu Rumman yang menyunting *Post Islamism: New Phase or Ideological Delusions?* terbitan Friedrich-Ebert-Stiftung Jordan & Iraq tahun 2018 menampilkan pemikiran dari sejumlah cendekiawan muslim tentang fenomena politik Islam di dunia Islam pasca Perang Dingin, khususnya setelah gelombang *Arab Spring*. Buku tersebut menunjukkan keberagaman gerakan Islamisme di berbagai negara Islam, pada masa bersamaan juga menunjukkan keberagaman respons terhadap perkembangan Islamisme tersebut yang mengarah kepada bentuk Pos-Islamisme. Namun demikian menurutnya, tidak ada kesepakatan umum di antara para ilmuwan mengenai makna tepat dari Pos-Islamisme (M Abu Rumman, 2018).

Sebagian melihat Pos-Islamisme sebagai bentuk dari 'jalan lain' sekularisme: premis-premis Islamisme ditinggalkan demi mengembalikan proses memisahkan agama dan politik, seperti yang terjadi pada abad-abad sebelumnya sebelum munculnya gerakan

Islam modern yang mengkritik sekulerisme (Amin & Said, 2011; Hossain, 2016; Mohammad Abu Rumman, 2018). Tapi sebagian lain, seperti Asef Bayat, melihat Pos-Islamisme berbeda dengan sekulerisme. Melainkan lebih sebagai tren kelompok Islamis mengkonseptualisasikan ulang makna tentang hak, kewajiban, keberagaman, kesejarahan, keyakinan, hingga kebebasan dalam Islam. Rumman menampilkan pengalaman Pos-Islamisme yang berbeda dari model Indonesia, Iran dan Iraq, serta ‘kegagalan ideologis’ kaum Islamis di Mesir, Maroko, dan Yaman.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu, bagaimana perbandingan model Pos-Islamisme yang terjadi di Arab Saudi dan Iran. Model yang dimaksud adalah pola relasional masyarakat Islam terhadap kekuasaan baik di Arab Saudi maupun Iran dimana masing-masing menunjukkan kekhasan parsial. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan fenomena dan perkembangan Pos-Islamisme yang terjadi di Arab Saudi dan Iran. Adapun signifikansi penelitian ini adalah untuk melengkapi khazanah ilmiah kajian politik Islam dalam konteks Hubungan Internasional. Penelitian ini berargumen bahwa Pos-Islamisme sebagaimana yang dikonseptualisasikan Asef Bayat terhadap fenomena di Iran, juga terjadi secara umum di dunia Islam, termasuk di Arab Saudi. Namun pola relasional dalam Pos-Islamisme di Arab Saudi berbeda dengan yang terjadi di Iran. Fenomena Pos-Islamisme yang terjadi pada kedua negara termanifestasi melalui isu kebebasan, modernitas, dan pembangunan, serta relasi masyarakat terhadap negara.

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Pos-Islamisme. Teori ini pertama kali diperkenalkan Asef Bayat dalam artikelnya berjudul *“The Coming of Post-Islamist Society”* di Jurnal Critical Middle Eastern Studies tahun 1996 (Asef Bayat, 1996b). Setelah itu, Bayat menulis sejumlah artikel ilmiah yang menguatkan koseptualisasi Pos-Islamisme berupa jurnal dan buku, seperti *“What is Post-Islamism?”* (2005), *“Making Islam Democracy: Social Movements and The Post-Islamist Turn”* (2007), *“No Silence, No Violence: A Post-Islamist Trajectory”* (2009), *“Post-Islamism: The Many Faces of*

Political Islam” (2013), *“Post-Islamism at Large”* (2013), *“Making of The Post-Islamist Iran”* (2013), dan *“Egypt and Its Unsettled Islamism”* (2013).

Asef Bayat menyebut Pos-Islamisme sebagai terminologi baru menyikapi fenomena keberagamaan umat Islam modern secara sosial-politik, khususnya di Iran pasca-Khomeini dan Mesir. Pos-Islamisme adalah fenomena pemikiran dan gerakan kelompok Islamis dan partisipasi mereka dalam modernitas dan sistem politik demokratis. Menurutnya, telah terjadi perubahan pradigmatik pada kelompok Islamis dari yang militan, eksklusif, dan dogmatis, ke arah yang lebih inklusif, plural dan toleransi. Asef Bayat membaca fenomena tersebut khususnya pasca Perang Irak-Iran tahun 1988, serta adanya transformasi sosial-politik dan intelektual di bawah pemerintahan Rafsanjani. Dampak revolusi Islam di Iran pada tahun 1979 menyeruak dan menyebar hingga ke berbagai belahan dunia Islam. Termasuk tema-tema yang menurutnya sebagai Pos-Islamisme (Asef Bayat, 2007b, 2005).

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan menggunakan metode studi perbandingan (*comparative study*). Studi komparatif pada penelitian kualitatif bertujuan mencari jawaban fundamental tentang sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab munculnya sebuah fenomena. Perbandingan dilakukan terhadap persamaan dan perbedaan dari dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek penelitian berdasarkan kerangka teori atau konsep yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif, sebuah makna atau arti merupakan hal yang sangat penting untuk dibicarakan, karena pokok utama dari penelitian kualitatif adalah menganalisis yang ditambah dengan tidak hanya berfokus kepada hasil saja, melainkan melihat proses yang ada (Bogdan & Bikle, 1982; Somantri, 2005).

Penggunaan logika induktif yakni logika khusus-umum, cukup kental dan populer dalam penelitian kualitatif. Karena kekuatan logika induktif terletak pada kemampuan peneliti untuk melakukan kategorisasi berdasarkan temuan-temuan data di lapangan. Sehingga dengan demikian, ciri dari penelitian kualitatif adalah berupa rangkaian konteks

informasi yang akan membentuk pola atau teori untuk menjelaskan fakta sosial yang berjalan (Creswell, 1999; 2009; 1994).

Data penelitian yang dihimpun berdasarkan studi kepustakaan (*library research*). Yaitu dengan mengumpulkan dokumen kepustakaan sebanyak-banyaknya berupa buku, jurnal, dan media, kemudian dieksplorasi berdasarkan tema dan tujuan penelitian. Objek penelitian ini adalah fenomena relasi islam dan negara yang terjadi di Arab Saudi dan Iran. Sementara Arab Saudi dan Iran menjadi subjek penelitian itu sendiri.

Hasil dan Pembahasan

Pos-Islamisme Model Arab Saudi

Dinamika Pos-Islamisme yang terjadi di Arab Saudi berpola top-down. Artinya, dorongan perubahan justru berawal dari kerajaan yang melakukan terobosan kebijakan reformatif dan sistemik sehingga mengubah sistem sosial budaya masyarakat Arab Saudi. Dinamika ini khususnya terjadi sejak Muhammad bin Salman (MBS) diangkat sebagai Putra Mahkota. Diawali dalam bidang sosial-keagamaan, kerajaan Arab Saudi justru menangkap banyak ulama terkenal (Syahriyanto, 2020). Diantara ulama-ulama tersebut, ada yang merupakan imam Masjidil Haram, profesor di perguruan tinggi ternama di Arab Saudi, hingga hakim pada pengadilan hukum Islam. Mereka antara lain Imam Masjidil Haram Syekh Saleh Al Talib, ulama penghafal 9 kitab hadis Syekh Sulayman Al alwan, Profesor Universitas Imam Muhammad ibn Saud Syekh Nasser Al Omar, Syekh Sulayman Ad Duwaisy, doktor Universitas Ummul Qura Syekh Safar Hawali, Syekh Abdullah Basfar yang mengimami shalat berjamaah di halaman Hagia Sofia Turki, Syekh Salman Al Audah, ulama perempuan Syeikhah Aisha Al Muhajiri, Syekh Musa Al Qarni, dekan Fakultas Syariah Universitas Imam Muhammad ibn Saud Syekh Saud Al Funaisan, Syekh Yusuf Al Ahmad, dan Syekh Uwad Al Qarni (Hanoum, 2022; Syahriyanto, 2020). Umumnya mereka ditangkap karena seringkali memberikan kritikan keras terhadap Kerajaan. Ada juga yang ditangkap karena dukungan terhadap pemerintah yang dianggap sebagai musuh diplomatik kerajaan, seperti Turki dan Qatar (Suryakuumah, 2023; Wirachmi, 2022). Selain itu, MBS juga menegaskan bahwa Wahabisme bukanlah satu-satunya ideologi di Arab Saudi. Hal ini

tentunya sangat bertentangan dengan tatanan ideologi yang selama ini dianut dan berlaku di negeri tersebut dalam beberapa dekade terakhir (Amalia, 2022; Sutardi, 2022).

Lebih dari itu, MBS menangkap beberapa anggota keluarga kerajaan yang dinilainya berseberangan secara garis politik, seperti adik Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud Pangeran Ahmed bin Abdulaziz, mantan putra mahkota Mohammad bin Nayef, Pangeran Al-Miteb, dan Pangeran Al-Waleed bin Talal. Pencopotan dan penangkapan terhadap anggota keluarga kerajaan dilakukan MBS dalam kerangka penegakan hukum dengan membentuk Komite Anti-Korupsi. Mereka juga ada yang dituduh melakukan kudeta terhadap kerajaan. Ada 11 mantan Putera Mahkota, 4 menteri, 10 mantan pejabat, dan sejumlah pengusaha atas dugaan perkara korupsi yang ditangkap (BBC, 2020; Merdeka, 2020; Muhaimin, 2020).

Selain melakukan pembersihan politik dan penataan ulang keagamaan, Arab Saudi di bawah pemerintahan MBS melakukan sejumlah kebijakan modernisasi yang bertentangan dan melampaui norma-norma Wahabisme yang selama ini dianut secara ketat oleh kerajaan. Begitu kuatnya penerapan norma tersebut, hingga tidak terdengar adanya aspirasi gerakan masyarakat di Arab Saudi yang menuntut reformasi dan kebebasan. Terobosan kebijakan yang dilakukan MBS berkaitan dengan perkembangan internal dan eksternal Arab Saudi. Pada aspek eksternal misalnya, kebijakan MBS dipengaruhi dinamika geopolitik dan geoekonomi kawasan dimana negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab dan Qatar telah lebih dulu melakukan pembangunan ekonomi melalui liberalisasi perdagangan dan investasi pariwisata sejak satu dekade terakhir. Sementara Arab Saudi harus menghadapi realitas geopolitik karena bersebelahan dengan sejumlah negara Arab lainnya di sebelah utara dengan tingkat demokratisasi dan keamanan yang relatif tidak terlalu baik.

Pada aspek internal, MBS menyadari seiring berjalannya waktu sumber daya alam minyak bumi dan gas yang dimiliki Arab Saudi semakin menipis. Sehingga Arab Saudi sudah harus melepaskan ketergantungan sumber kekayaannya hanya dari migas. Sedangkan selama ini sumber-sumber lain terutama pariwisata masih sangat rendah. Salah satu faktornya disebabkan sistem hukum dan sosial-budaya di Arab Saudi yang bersifat

konservatif dinilai sebagai penghalang investasi dan pariwisata. Untuk itu, MBS melakukan sejumlah terobosan kebijakan yang dinilai kontroversial. Keberanian mendobrak norma Islam konservatif tersebut terlihat dalam pernyataan MBS yang menegaskan bahwa Wahabisme bukanlah satu-satunya ideologi yang berlaku di Arab Saudi (Amalia, 2022; Sutardi, 2022).

Pos-Islamisme yang diwujudkan MBS jelas dalam bentuk reformasi kerajaan dan modernisasi negara. Kebijakan modernisasi negara tersebut seluruhnya dituangkan dalam sebuah *grand strategy* yang disebut sebagai Saudi Vision 2030 (House, 2019; Jasser El-Sissi, 2018). Beberapa kebijakan revolusioner tersebut antara lain Pembangunan *smart city NEOM*, liberalisasi hak kaum perempuan Saudi, modernisasi infrastruktur haji, hingga normalisasi hubungan dengan Iran.

Pertama, pembangunan kota pintar (*smart city*) NEOM. Megaproyek *smart city NEOM* pertama kali diumumkan pada 2017, tidak lama setelah MBS diangkat sebagai Putra Mahkota. Artinya, meskipun secara *de jure* Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud sebagai pemimpin Kerajaan Arab Saudi, namun secara *de facto* kepemimpinan Arab Saudi banyak diambil alih dan dikendalikan oleh Sang Putra Mahkota, Muhammad bin Salman (MBS). Pangeran MBS mengumumkan peluncuran NEOM sebagai megacity futuristik NEOM pada konferensi “Future Investment Initiative” di Riyadh pada 24 Oktober 2017 (Frag, 2019; Hend Aly, 2019; NEOM, 2017). Tujuan konferensi itu adalah mengundang para investor dan pakar teknologi berbagai negara untuk berpartisipasi dalam megaproyek ambisius tersebut. Pembangunan *smart city NEOM* sendiri merupakan bagian dari Arab Saudi Vision 2030 yang dicanangkan MBS. Pada saat itu, MBS menargetkan megaproyek berbiaya USD 500 miliar tersebut dapat rampung di tahun 2025 (Hasan Chowdhury, 2023; Rayhan Uddin, 2023). Melalui pembangunan kota pintar seluar 26,500 km² tersebut, Arab Saudi berharap dapat mengundang lebih banyak lagi wisatawan asing untuk tinggal sebagai strategi kerajaan dalam diversifikasi ekonomi menyusul semakin menipisnya cadangan migas yang dimiliki Arab Saudi (Merlyn Thomas, 2022).

Bahkan Arab Saudi juga berambisi membangun pemukiman sepanjang 100 mil atau sekitar 170 km dengan lebar 200meter yang dibangun menyerupai cermin, yang disebutnya

sebagai ‘The Line’. Dalam kota ini nantinya dapat menampung 9 juta penduduk dengan fasilitas teknologi transportasi modern dan futuristik yang *zero-carbon* karena tidak mengizinkan penggunaan kendaraan pribadi dan tidak dibangun jalan (Rayhan Uddin, 2023).

Kedua, kebijakan sosial budaya yang kontroversial. Sebagai dampak dari Saudi Vision 2030, MBS memberlakukan banyak kebijakan revolusioner yang mengkoreksi hukum-hukum Islam yang selama ini berlaku di Arab Saudi. Kebijakan MBS berhasil membuat Arab Saudi yang lebih membuka diri terhadap modernitas yang selama ini cenderung dicurigai. Namun MBS menolak mengatakan pemikiran dan kebijakannya sebagai pertentangan terhadap syariah Islam, meskipun tidak sedikit ulama-ulama Arab Saudi yang menentang terobosan-terobosan tersebut.

Sejumlah kebijakan yang mendobrak kultur konservatif tersebut seperti dibolehkannya perempuan Saudi menyetir mobil sendirian dan bepergian tanpa mahram, dan bebas mengenakan pakaiannya yang sopan dan terhormat (Arbar, 2021). Bahkan kawasan King Abdullah City dijadikan sebagai salah satu kota internasional dimana norma-norma sosial diberlakukan secara longgar, dan masyarakat diperbolehkan untuk beraktifitas di pantai-pantai privat dengan mengenakan pakaian renang atau bikini (Arbar, 2021; Bernardette Aderi Puspaningrum, 2022). Pengeran MBS juga mencabut larangan konser dan bioskop yang sudah berlaku lebih dari tiga dekade. Banyak musisi dunia dari Barat, seperti Black Eyed Peas dan Mariah Carey yang sudah tampil di Arab Saudi. Berbagai festival mewah besar-besaran juga sudah sering digelar, seperti salah satunya festival Riyadh Season 2021 dengan artis Amerika Serikat, rapper Pitbull. Hari Halloween pun kini dirayakan di Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi dibawah kepemimpinan MBS membuka keran kebebasan kepada kaum perempuan dengan mencabut banyak pasal dari hukum syariah yang sebelumnya dianggap mengekang hak dan kebebasan perempuan. Termasuk keterlibatan perempuan dalam militer. (Arbar, 2021; Bernardette Aderi Puspaningrum, 2022; Permana, 2020; Sandria, 2021).

Ketiga, normalisasi hubungan dengan Israel dan Iran. Jauh sebelum serangan Badai Al-Aqsha (*Thuffan Al-Aqsha*) oleh HAMAS pada 7 Oktober 2023 dan invasi Israel ke Gaza

setelah itu, isu normalisasi diam-diam Arab Saudi dengan Israel tercium kuat dalam tiga tahun terakhir. Pangeran Arab Saudi MBS diam-diam melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menlu AS Mike Pompeo di Washington pada tahun 2020. Pertemuan itu menjadi sinyal kuat hubungan kedua negara, yakni Arab Saudi dan Israel untuk melakukan normalisasi meskipun Kerajaan Arab Saudi tidak terbuka menyatakan hal tersebut. Pada pertemuan itu, kedua negara juga membicarakan perkembangan di Timur Tengah (Jaramaya, 2020). Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengisyaratkan kemungkinan kemajuan kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan Arab Saudi. Isyarat tersebut terungkap pasca kunjungan penasihat keamanan nasional Gedung Putih ke Jeddah pada 19 Juli 2023 lalu (CNN Indonesia, 2023). Secara geopolitik, dialog pertemuan kedua negara yang mengarah kepada normalisasi dapat dianalisis sebagai menguatnya pengaruh AS di kawasan, sekaligus secara bersamaan sebagai reaksioner atas perkembangan Iran di Timur Tengah (Mohammed al-Ragawi, Mohamed Amin, 2021).

Selain itu, MBS juga mendorong normalisasi hubungan diplomatik dengan Iran. Pembukaan hubungan diplomatik kedua negara seakan mencairkan perang ideologi yang selama ini berlangsung diantara kedua negara (Muhaimin, 2023). Arab Saudi tentunya memerlukan situasi geopolitik yang aman di kawasan dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan pencapaian Saudi Vision 2030. Arab Saudi dihadapkan pada pilihan normalisasi di antara Israel atau Iran, atau keduanya. Apalagi jika melihat lebih dekat megaproyek NEOM yang terbentang dari Mesir hingga Yordania, sudah pasti keberlangsungan NEOM juga sangat tergantung pada stabilitas kawasan. Sehingga dalam konteks ini juga, isu normalisasi Arab Saudi dengan Israel dan Iran mendapatkan relevansinya (IISS, 2020; Podeh, 2018; Sulistyawati, 2021; Wirawan, 2020).

Pos-Islamisme Model Iran

Berbeda dengan yang terjadi di Arab Saudi, gejala Pos-Islamisme di Iran justru berpola *bottom-up*. Dalam artian, tuntutan perubahan dan reformasi sistem Islam datang dari masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat muslim di Iran lebih dinamis daripada

masyarakat muslim di Arab Saudi. Kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh faktor sejarah sosial politik dan faktor ideologi keagamaan.

Pada masanya, revolusi yang digerakkan Imam Khomeini menggulingkan rezim kerajaan Shah Reza Pahlevi tahun 1979 merupakan bentuk reformasi system pemerintahan yang berlaku saat itu. Upaya reformasi tersebut mendapat dukungan luas dari masyarakat Iran. Kehadiran Imam Khomeini dianggap membawa harapan dan pembaharuan melalui sistem *wilayatul faqih* yang berbasiskan pada ideologi Syiah Imamiah atau Itsna Asyariyah. Namun seiring dengan berjalannya waktu sistem Islam-Syiah yang diberlakukan di Iran pasca revolusi 1979 justru berkembang menjadi neo-konservativisme yang mengekang demokratisasi dan kebebasan. Perkembangan ini mendorong lahirnya kelompok baru Pos-Islamisme yang mendesak reformasi terhadap sistem politik dan pemerintahan *wilayatul faqih*. Suara reformasi Pos-Islamisme ini pertama kali dinarasikan oleh Asef Bayat yang membandingkan perkembangan gerakan politik Islam di Iran dan Mesir (Asef Bayat, 2007a, 2005).

Salah satu tokoh pertama yang menggugat pemerintahan revolusi ialah Ayatullah Kazem Shari'atmadari. Menurut Shari'atmadari, revolusi hanya alat untuk menghancurkan rezim diktaktor dan menggantikannya dengan pemerintah demokrasi yang berasaskan prinsip-prinsip Islam, dan menekankan pentingnya peran rakyat dalam demokrasi Islam. Karena itu, Shari'atmadari menentang kekuasaan berlebihan tanpa batas yang dimiliki para mullah menjadi suatu keniscayaan (Gili Argenti, 2018). Tokoh lainnya yang juga mengkritisi otoritas *wilayaul faqih* adalah Ayatullah Montazeri. Montazeri melihat rezim mullah terlalu banyak campur tangan dalam urusan masyarakat, bahkan bertindak brutal terhadap orang atau kelompok yang mereka pandang sebagai musuh Islam. Padahal mereka hanya mengekspresikan kekecewaan terhadap rezim yang semakin represif (Bambang Cipto, 2004; Gili Argenti, 2018).

Gerakan kritis terhadap rezim pemerintahan *wilayatul faqih* terus bergulir dilakukan unsur-unsur *civil society* di Iran, seperti mahasiswa dan gerakan intelektual kampus. Kemenangan Mohamad Khatami dalam pemilu tahun 1997 dianggap banyak pihak sebagai tanda kemenangan kaum reformis di Iran. Slogan toleransi, modernisasi dan keterbukaan

dalam kampanye Muhammad Khatami mampu menarik pemilih dari kalangan kaum muda yang berjumlah lebih dari 70 persen populasi penduduk Iran untuk menyalurkan pilihannya pada Khatami. Fenomena kemenangan Khatami menunjukkan rakyat Iran sudah jenuh dengan otoritarianisme sistem yang didominasi kalangan agamawan. Sementara mereka menginginkan demokratisasi dan keterbukaan (Gili Argenti, 2018). Kuatnya dukungan terhadap Khatami dan ide-ide pembaharuan yang dibawanya berdampak pada kemenangan kedua kalinya dalam pemilu di tahun 2001.

Dalam buku yang ditulisnya, Khatami mengkritik pemerintah Iran dan saat bersamaan memberi dukungan terhadap prinsip-prinsip demokrasi liberal, perlunya consensus antara penguasa dan rakyat, serta pemikiran tentang pemerintahan Islam yang berbasis pada kedaulatan rakyat, bukan otoritarianisme kelompok agamawan. Khatami menyerukan ruang kebebasan bagi rakyat Iran untuk dapat menerjemahkan *wilayatul faqih* sesuai perkembangan zaman dan rakyat Iran berhak mengambil manfaat modernitas dari Barat (Bambang Cipto, 2004; Gili Argenti, 2018).

Setidaknya ada dua faktor penyebab munculnya gerakan reformasi di Iran, yang dibaca intelektual Asef Bayat sebagai Pos-Islamisme. *Pertama*, kesenjangan antargenerasi setelah revolusi Iran berusia dua lebih dari dekade dalam hal cara hidup dan interaksi dalam lingkungan baik regional maupun internasional. *Kedua*, dampak dari perubahan yang berhembus di seluruh dunia (Abd.Rahman, 2003), terutama setelah berakhirnya era Perang Dingin. Perlu dicatat, bahwa Khatami dan generasi pendukungnya memenangkan pemilu tahun 1997, setengah dekade setelah era bipolarisme Perang Dingin berakhir. Pasca itu, yang berkembang di dunia adalah globalisasi nilai-nilai demokrasi, liberalisme, kesetaraan, emansipasi, dan hak asasi manusia.

Iran tentunya tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh dinamika hubungan internasional. Para pendukung reformasi lahir pada saat revolusi berlangsung, atau baru berusia tiga hingga lima tahun di saat revolusi 1979. Kemudian mereka tumbuh berkembang dan mencapai usia dewasa di era kemenangan revolusi, sebuah generasi yang tidak pernah mengalami penindasan politik rezim Reza Pahlevi. Akan tetapi, generasi ketiga ini tidak serta merta menerima nilai-nilai revolusi itu. Selain tidak pernah mengalami

penindasan politik rezim Pahlevi, mereka juga tidak pernah berinteraksi dengan Pemimpin Tertinggi Ayatullah Khomeini, sehingga daya rekat doktrin revolusi terhadap generasi ini tidak sekuat generasi sebelumnya. Pada gilirannya, generasi ini jauh lebih kritis serta tidak terlalu terikat dengan doktrin revolusi, di sinilah kesenjangan ideologis itu terjadi, mereka melakukan pemberontakan terhadap doktrin revolusi (Abd.Rahman, 2003; Bambang Cipto, 2004).

Kasus meninggalnya Mahsa Amini pada 16 September 2022 lalu, memicu gelombang protes atas pemberlakuan hukum syariah terutama terkait dengan undang-undang kewajiban berhijab bagi warga perempuan muslimah (Angelica Silva, 2022). Peristiwa tersebut menunjukkan akumulasi kejenuhan generasi produktif Iran atas sistem pemerintahan Iran yang konservatif. Peristiwa itu menjadi momentum publik untuk mengekspresikan suara dan kebebasan mereka, yang merupakan kelanjutan dari gerakan reformasi yang sudah dimulai sejak tahun 1990-an. Namun dalam satu dekade terakhir, gerakan kritis tersebut lebih banyak disuarakan oleh kaum perempuan Iran (Hein, 2019).

Gerakan dan Modernisasi

Pos-Islamisme merujuk pada fenomena perubahan sosial politik baik intelektual maupun gerakan masyarakat muslim yang mengkritisi tatanan norma dan nilai Islam mainstream yang berlaku. Akan tetapi, kritisisme tersebut tidak berarti meninggalkan nilai Islam keseluruhan, melainkan sebagai bentuk lain dari penyegaran terhadap pemahaman nilai-nilai Islam yang telah berlaku terutama dalam hubungannya dengan demokrasi dan modernitas. Cendekiawan tidak bersepakat tentang epistemologi ini (M Abu Rumman, 2018). Sebagian melihat Pos-Islamisme sebagai bentuk dari 'jalan lain' sekulerisme dengan meninggalkan premis-premis Islamisme demi pemisahan agama dan politik, seperti yang terjadi pada abad-abad sebelumnya sebelum muncul gerakan Islamis modern yang mengkritik sekulerisme (M Abu Rumman, 2018). Tapi sebagian lain, seperti Asef Bayat, melihat Pos-Islamisme berbeda dengan sekulerisme (Asef Bayat, 2007a, 2005). Ada juga cendekiawan yang mensinonimisasi Pos-Islamisme dengan reformasi Islam dan liberalisme Islam (Lacroix, 2013), ada juga yang menyebut *post-wahabism* dalam konteks Arab Saudi (Sinani, 2022).

Ketika membandingkan fenomena transisi politik domestik antara Iran dan Mesir di tahun 1970-1980an, intelektual Iran Asef Bayat menyimpulkan sebuah pernyataan menarik tentang model Pos-Islamisme yang terjadi di kedua negara, yakni Revolusi tanpa Gerakan (Iran) dan Gerakan tanpa Revolusi (Mesir) (Asef Bayat, 2007a, 1996a; Tezcür, 2008). Mengikuti pola demikian, maka tidak berlebihan jika perbandingan dinamika Pos-Islamisme yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran saat ini dinyatakan sebagai modernisasi tanpa gerakan (Arab Saudi) dan gerakan tanpa modernisasi (Iran).

Upaya reformasi di Arab Saudi sebenarnya sudah terjadi sejak sebelum naiknya Salman bin Abdul Aziz ke tahta kerajaan. Lebih tepatnya, dimulai sejak rezim Raja Abdullah. Namun pergerakan reformasi tidak dilakukan secara revolusioner sebagaimana keberanian yang dilakukan MBS saat ini. Penyebabnya adalah kuatnya kelompok ultra-konservatif di Arab Saudi. Di antara negara-negara Teluk Arab (*Gulf Countries Cooperation/GCC*), Arab Saudi salah satu negara yang lambat dalam reformasi pasca era Perang Dingin, dibandingkan dengan negara lainnya seperti Uni Emirat Arab dan Qatar. Pertarungan kelompok konservatif dan reformis sangat ketat, sehingga pada tahun 1970-an pengaruh kelompok konservatif seperti *Syafaah Movement* berhasil mendominasi kerajaan. Juhayman al-Utaibi memimpin revolusi sampai berdarah-darah dalam mengukudeta Ka'bah pada akhir tahun 1970-an. Sejak saat itu, Arab Saudi berubah dan dikendalikan oleh kelompok radikal (Ayu Purwaningsih, 2021). Jauh sebelum gerakan itu muncul, di Arab Saudi sudah terdapat modernisasi yang ditunjukkan dengan kehadiran sejumlah biskop dan tempat hiburan lainnya. Besnik Sinani (2022) mengistilahkan fenomena dinamika yang terjadi di Arab Saudi sebagai *post-wahabism*, yang sebenarnya juga merupakan salah satu wajah dari banyak spektrum wajah Pos-Islamisme sebagaimana yang dimaksud oleh Asef Bayat (al-Anani, 2014), atau Stephane Lacroix yang tetap menyebut Pos-Islamisme di Arab Saudi sebagai gerakan Islam liberal (Lacroix, 2013).

Pangeran MBS menolak liberalisasi yang dilakukannya sebagai penentangan terhadap Islam. MBS menyebut kebijakan sosial-politik yang diambilnya sebagai upaya mengembalikan nilai-nilai moderatisme Islam yang selama lebih dari 30 tahun ditutup oleh dominasi kelompok konservatif wahabi (Chulov, 2017; House, 2019). Tidak ada gerakan

reformasi apapun dari unsur masyarakat sipil (*civil society*) di Arab Saudi yang menghendaki perubahan ini. Ketiadaan kehendak tersebut disebabkan kuatnya cengkraman doktrin dan hukum ultra-konservatif dalam kehidupan masyarakat di Arab Saudi. Dengan kata lain, perubahan sosial budaya masyarakat muslim Arab Saudi justru berawal dari kebijakan revolusioner kerajaan yang mendobrak nilai-nilai Islam konservatif itu sendiri. Pos-Islamisme dalam hal ini adalah modernisasi tanpa gerakan. Dikutip dari media Inggris, *The Guardian*, Pangeran MBS menyatakan hal penting yang menyiratkan mengenai keterbukaan ideologis Arab Saudi saat ini.

"Kami hanya kembali ke apa yang kami ikuti – Islam moderat yang terbuka untuk dunia dan semua agama. 70% orang Saudi berusia di bawah 30 tahun, sejujurnya kami tidak akan menyia-nyikan 30 tahun hidup kami untuk memerangi pemikiran ekstremis, kami akan menghancurkannya sekarang dan segera. Apa yang terjadi dalam 30 tahun terakhir bukanlah Arab Saudi. Apa yang terjadi di kawasan ini dalam 30 tahun terakhir bukanlah Timur Tengah. Setelah revolusi Iran pada tahun 1979, orang ingin menyalin model ini di berbagai negara, salah satunya adalah Arab Saudi. Kami tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dan masalahnya menyebar ke seluruh dunia. Sekarang saatnya untuk menyingkirkannya."(Chulov, 2017)

Berbeda dengan Arab Saudi, dinamika di Iran menunjukkan gejala Pos-Islamisme yang sebaliknya. Pada awalnya, revolusi yang menggulingkan Shah Reza Pahlevi pada tahun 1979 dipandang sebagai reformasi sistemik menggantikan otoritarianisme. Karena itu revolusi pimpinan Ayatullah Khomeini mendapat dukungan yang sangat luas dari masyarakat (Shahibzadeh, 2016). Padahal dapat dikatakan, revolusi tersebut justru membalikkan modernisme kepada konservativisme. Tapi euforia terhadap revolusi tidak berlangsung lama. Sejak akhir 1980-an sudah muncul gerakan masyarakat sipil (*civil society*) yang menuntut realisasi janji-janji revolusi terkait keadilan sosial (*social justice*) dan partisipasi demokrasi. Namun system *wilayatul faqih* yang diterapkan Khomeini justru menduplikasi otoritarianisme baru atas nama agama (Vahabzadeh P, 2017). Eksklusivitas Republik Islam Iran mendapat kritik dan perlawanan dari masyarakat, khususnya kaum muda sebagai kelompok yang responsif terhadap dinamika budaya dan politik. Konfrontasi

orang-orang muda ini ternyata berimplikasi pada prinsip-prinsip revolusi, dan bahkan mengubah sistem sosial dan budaya masyarakat Iran (Wafi, 2021).

Meskipun rezim *wilayatul faqih* tetap kuat sepeninggal Khomeini, akan tetapi tidak berarti pemerintahan Iran hening dari tekanan gerakan-gerakan sosial. Iran memiliki sejarah gerakan masyarakat sipil (*civil society*) yang cukup panjang yang sudah terbentuk sebelum rezim revolusi berkuasa. Kehadiran kelompok-kelompok tersebut mengalami pasang surut, tidak berarti hilang sama sekali. Kehadiran mereka juga disebabkan faktor sosial budaya masyarakat Iran yang heterogen dan terbentuk oleh mentalitas budaya Persia (Samur, 2008).

Pada masa rezim revolusi, otoritas *wilayatul faqih* seringkali melabeli kelompok-kelompok masyarakat sipil (*civil society*) Iran sebagai ‘agen imperialisme’ dan menerima tekanan-tekanan dari pemerintah. Hal tersebut menunjukkan ketertutupan sistem *wilayatul faqih* untuk menerima perubahan (Bradley, 2007). Pada tahun 1990-an di masa Presiden Rafsanjani, muncul Gerakan Perempuan Iran (*Woman’s Movement*), Gerakan Reformis Islam (*Islamic Reformist Movement*), dan Gerakan Demokrasi (*Democracy Movement*) yang menuntut keterbukaan, liberalisasi dan demokratisasi di Iran (Povey, 2015). Kemunculan gerakan-gerakan tersebut tidak membuat sistem *wilayatul faqih* goyah, tapi justru melahirkan Gerakan Konservatisme Baru (*New Conservatism Movement*) pada tahun 2004 dengan presidennya Mahmoud Ahmadinejad (Povey, 2015). Gerakan-gerakan ini terus menerus menemukan momentumnya dalam dinamika kehidupan sosial-politik di Iran sekalipun gerakan *civil society* tersebut tidak sampai mengubah secara sistemik jalannya pemerintahan. Termasuk dalam kasus terakhir dalam isu Mahsa Amini tahun 2022 yang menimbulkan perlawanan Gerakan Perempuan Iran hingga ke pelosok-pelosok negeri. Gerakan-gerakan tersebut menggambarkan dialektika Pos-Islamisme yang berlangsung di Iran pasca revolusi, Gerakan tanpa Modernisasi.

Kesimpulan

Pos-Islamisme menjadi gejala sosial politik yang umum terjadi di banyak negara muslim, terutama sejak akhir tahun 1970-an yang ditandai dengan revolusi yang terjadi di Iran tahun 1979. Inti dari Pos-Islamisme adalah upaya kritis baik secara gerakan maupun intelektual terhadap norma islamisme, tapi tanpa melepaskan ciri universal dari Islam itu sendiri. Umumnya, upaya Pos-Islamisme di dunia Islam bersifat *bottom-up*, yakni berawal dari gerakan masyarakat sipil Islam (*civil society*) terhadap rezim dan norma islamisme yang berlaku. Akan tetapi, tidak selalu proses Pos-Islamisme tersebut bermuara pada keberhasilan, seperti kasus di Iran.

Berbeda dengan Iran, gejala Pos-Islamisme di Arab Saudi justru berawal dari dalam kerajaan, karena itu bersifat *top-down*. Dalam hal ini, serangkaian kebijakan politik populis yang dilakukan Pangeran Muhammad bin Salman (MBS) dengan mendobrak pakem-pakem norma konservatisme Islam dipandang sebagai bentuk Pos-Islamisme. Meskipun tidak ada gerakan sipil sama sekali yang melakukan hal tersebut. Ada cendekiawan yang menyebut Pos-Islamisme di Arab Saudi sebagai reformasi, liberalisme Islam, ada juga yang menyebutnya sebagai *post-wahabisme*. Fenomena gejala Pos-Islamisme yang terjadi di Arab Saudi menggambarkan model peristiwa modernisasi tanpa gerakan. Sementara peristiwa yang terjadi di Iran menggambarkan sebaliknya, yakni gerakan tanpa modernisasi.

Diskursus tentang Pos-Islamisme masih menarik untuk menjadi topik penelitian mendatang. Karena diskursus ini pada dasarnya berkaitan dengan relasi islam dan politik atau negara dalam sistem hubungan internasional, dimana dinamika hubungan internasional yang dinamis dan cepat berubah, seringkali berdampak langsung terhadap dunia Islam. Sementara setiap aktor di dunia Islam memiliki sisi histori-budaya dan pola Pos-Islamisme berbeda dan khas masing-masing.

Referensi

- Abd.Rahman, M. (2003). *Iran Pasca Revolusi:Fenomena Pertarungan Kubu Reformis dan Konservatif*. Kompas.
- al-Anani, K. (2014). Post Islamism: The Changing Faces of Political Islam, edited by Asef Bayat. *Sociology of Islam*, 2(3–4), 347–350. <https://doi.org/10.1163/22131418-00204014>
- Amalia, T. (2022). *Alasan Mohammed bin Salman Ingin Hapus Wahabi jadi Satu-Satunya Paham di Arab Saudi*. Viva. <https://www.viva.co.id/berita/dunia/1539867-alasan-mohammed-bin-salman-ingin-hapus-wahabi-jadi-satu-satunya-paham-di-arab-saudi>
- Amin, H., & Said, E. (2011). From Islamism to Post-Islamism: The Coming of a New Intellectual Trajectory in Pakistan. In *The Sociology of Islam, Secularism, Economy and* https://www.academia.edu/download/7358160/the_sociology_of_islam_secularism_economy_and_politics.pdf#page=116
- Angelica Silva. (2022). *How the death of Iranian Mahsa Amini caused thousands of women to defy hijab laws - ABC News*. ABC News. <https://www.abc.net.au/news/2022-09-23/what-happened-to-mahsa-mini-iran-protests-death-iranian-women/101467612>
- Arbar, T. F. (2021). *Inilah Kebijakan Pangeran Arab yang Dobrak Aturan Konservatif*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211122130409-4-293397/inilah-kebijakan-pangeran-arab-yang-dobrak-aturan-konservatif>
- Argenti, G. (2018a). Comparative Study Of Post Islamism Between Partai Keadilan Sejahtera (PKS) With Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP). In *JWP (Jurnal Wacana Politik)*. [download.garuda.kemdikbud.go.id.
http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=855496&val=11318&title=Comparative Study Of Post Islamism Between Partai Keadilan Sejahtera PKS With Adalet Ve Kalkinma Partisi AKP](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=855496&val=11318&title=Comparative%20Study%20Of%20Post%20Islamism%20Between%20Partai%20Keadilan%20Sejahtera%20PKS%20With%20Adalet%20Ve%20Kalkinma%20Partisi%20AKP)
- Argenti, G. (2018b). Kelompok Post Islamisme Pasca Revolusi Islam Iran 1979. *Jurnal Politikom Indonesiana*. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/1418>
- Arsyad, H. (2022). Pemetaan Konflik Panjang Arab Saudi Dan Iran. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 101. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.37265>
- Asef Bayat. (2007a). *Making Islam Democracy: Social Movements and The Post-Islamist Turn*. Stanford University Press.
- Asef Bayat. (2007b). *Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn*. Stanford University Press. https://www.jstor.org/stable/26331163?casa_token=RhQQHxcE62wAAAAA:NCF6bh1PyTe-SdgYeqTqFRAcwo1TCpJZ8xgGdN0SttIy1jAhalfKFAzYYeve2Sbs5THoeb_4SnLPc

p8x4P-AKMRGZZvMfTMH9AUFkxIphKZBMJtDg

- Asef Bayat. (2013a). Egypt and Its Unsettled Islamism. In *The Changing Faces of Political Islam*. Oxford University Press, USA.
- Asef Bayat. (2013b). The Making of Post-Islamist Iran. In *The Changing Faces of Political Islam*. Oxford University Press.
- Asisian, N. (2016). Shia Iran and effects of globalization on state and religion: the beginning of post-Islamism era. In *Journal Article/ May*. researchgate.net. https://www.researchgate.net/profile/Njdeh-Asisian/publication/304976032_Shia_Iran_and_Effects_of_Globalization_on_State_and_Religion_The_Beginning_of_Post-Islamism_Era/links/577dddcf08aed807ae761049/Shia-Iran-and-Effects-of-Globalization-on-State-and-Rel
- Ayu Purwaningsih. (2021). *Transformasi Modernitas di Saudi*. Deutsche Welle. <https://www.dw.com/id/transformasi-modernitas-di-saudi-dalam-balutan-perseteteruan-dengan-iran/a-48983699>
- Bambang Cipto. (2004). *Dinamika Politik Iran : Puritanisme Ulama, Proses Demokratisasi dan Fenomena Khatami*. Pustaka Pelajar.
- Bayat, A. (2013). *Post-Islamism: The changing faces of political Islam*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ufJQEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=post+islamism&ots=9OablWIXMr&sig=xMxSkAiW0w7p5rRn0ahIA7UcVeE>
- Bayat, Asef. (1996a). The Coming of a Post-Islamist Society, Critique. *Critical Middle East Studies*, May, University of Hamline Minnesota.
- Bayat, Asef. (1996b). The coming of a post-Islamist Society. *Critique: Critical Middle Eastern Studies*, 5(9), 43–52. <https://doi.org/10.1080/10669929608720091>
- Bayat, Asef. (2005). What is Post-Islamism? *Isim*, 16(April), 5. https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/17030/ISIM-16-What_is-post?sequence=1
- Bayat, Asef. (2009). No silence, no violence: A post-Islamist trajectory. *Civilian Jihad: Nonviolent Struggle, Democratization, and Governance in the Middle East*, 43–52. <https://doi.org/10.1057/9780230101753>
- Bayat, Asef. (2013). Post-Islamism at Large. In *Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam* (pp. 3–30). Oxford University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199766062.003.0001>
- BBC. (2020). *Arab Saudi: Raja Salman pecat anggota keluarga kerajaan dari kementerian pertahanan - BBC News Indonesia*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53980283>
- Bernardette Aderi Puspaningrum. (2022). *Arab Saudi Cabut Aturan Wajib Hijab, Kenapa*

Banyak Wanita Pilih Potong Rambut Pendek Gaya “Boy.” Kompas. <https://www.kompas.com/global/read/2022/06/28/213200270/arab-saudi-cabut-aturan-wajib-hijab-kenapa-banyak-wanita-pilih-potong>

- Bogdan, R. C., & Bikle, S. K. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Method*. Allyn and Bacon.
- Bradley, M. (2007). *Political Islam, Political Institutions and Civil Society in Iran*. International Development Research Centre (IDRC).
- Chulov, M. (2017). *I will return Saudi Arabia to moderate Islam, says crown prince Saudi Arabia*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2017/oct/24/i-will-return-saudi-arabia-moderate-islam-crown-prince>
- CNN Indonesia. (2023). “Kode” Presiden AS Joe Biden soal Normalisasi Hubungan Saudi-Israel. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230729175537-120-979447/kode-presiden-as-joe-biden-soal-normalisasi-hubungan-saudi-israel>
- Creswell, J. (1999). Mix Method Research: Introduction and Application. In G. Cizek (Ed.), *Handbook of Educational Policy*. Ca Academic Press.
- Creswell, J. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publication.
- Dikarma, K. (2022). *Garda Revolusi Iran Rilis Angka Kematian dalam Demonstrasi Mahsa Amini*. Republika. <https://internasional.republika.co.id/berita//rm3rz7370/garda-revolusi-iran-rilis-angka-kematian-dalam-demonstrasi-mahsa-amini>
- Farag, A. A. (2019). *The Story of NEOM City: Opportunities and Challenges BT - New Cities and Community Extensions in Egypt and the Middle East: Visions and Challenges* (S. Attia, Z. Shafik, & A. Ibrahim (eds.); pp. 35–49). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77875-4_3
- Gardner, F. (2019). *Mohammed bin Salman: Manuver sang putra mahkota memodernisasi Arab Saudi dan tuduhan dalang pembunuhan Jamal Khashoggi - BBC News Indonesia*. BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49902217>
- Gili Argenti. (2018). Kelompok Post Islamisme Pasca Revolusi Islam Iran 1979. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 139–150.
- Hamid, I., & Setiadi, O. (2021). Arab Saudi dan Iran: Kontestasi Ideologi dan Dampaknya di Kawasan Timur Tengah Pasca The Arab Spring. *Politea*, 4(1), 129. <https://doi.org/10.21043/politea.v4i1.10453>
- Hanoum. (2022). *Ini Dia Daftar Ulama Terkenal yang Dibui Saudi, Apa Sebab?* Arrahmah. <https://www.arahmah.id/ini-dia-daftar-ulama-terkenal-yang-dibui-saudi-apa-sebab/>
- Harmakaputra, H. A. (2015). Islamism and post-Islamism: “Non-Muslim” in socio-political discourses of Pakistan, the United States, and Indonesia. *Al-Jami’ah*, 53(1), 179–204.

<https://doi.org/10.14421/ajis.2015.531.179-204>

- Hasan Chowdhury. (2023). *Saudi Arabia is exploring plans to raise \$2.7 billion for its futuristic mega-city in an effort to complete most of the construction by 2030*. Msn. <https://www.msn.com/en-us/news/world/saudi-arabia-is-exploring-plans-to-raise-27-billion-for-its-futuristic-mega-city-in-an-effort-to-complete-most-of-the-construction-by-2030/ar-AA1dYgtd>
- Hasan, M., & Hasan, M. (2020). Beyond Clash of Civilizations and Post-Islamism: Ummah(s) and the Muslim World. *Islam and Politics in Bangladesh: The Followers of ...* https://doi.org/10.1007/978-981-15-1116-5_2
- Hein, S. von. (2019). *Perempuan Iran Tuntut Perubahan di Negaranya*. DW. <https://www.dw.com/id/perempuan-iran-tuntut-perubahan-di-negaranya/a-47454923>
- Hend Aly. (2019). Royal Dream: City Branding and Saudi Arabia's NEOM. *Middle East Journal*, 12, 99–109.
- Hossain, A. A. (2016). Islamism, secularism and post-Islamism: the Muslim world and the case of Bangladesh. *Asian Journal of Political Science*, 24(2), 214–236. <https://doi.org/10.1080/02185377.2016.1185954>
- House, K. E. (2019). Profile of a Prince: Promise and Peril in Mohammed bin Salman's Vision 2030. *Belfer Center*, April. <https://www.belfercenter.org/publication/profile-prince-promise-and-peril-mohammed-bin-salmans-vision-2030>
- IISS. (2020). *The Abraham Accords: Israel–Gulf Arab normalisation*.
- Iswara, A. J. (2022). *Piala Dunia: Timnas Iran Tanpa Ekspresi, Tak Nyanyikan Lagu Kebangsaan untuk Dukung Demo Anti-Pemerintah*. Kompas. <https://www.kompas.com/global/read/2022/11/22/080849670/piala-dunia-timnas-iran-tanpa-ekspresi-tak-nyanyikan-lagu-kebangsaan>
- J W Creswell. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Sage Publication.
- Jaramaya, R. (2020). *Bahrain: Normalisasi dengan Israel Lindungi Kepentingan Negara*. Republika. <https://republika.co.id/berita/qgp0x8377/bahrain-normalisasi-dengan-israel-lindungi-kepentingan-nega>
- Jasser El-Sissi. (2018). *Centre for Middle Eastern Studies Saudi Arabian State Modernization Policies versus Traditional Values*.
- Jessie Yeung, M. S. (2022). *Mahsa Amini: Iran women protest and burn their hijabs over death of woman who died in police custody*. CNN. <https://edition.cnn.com/2022/09/21/middleeast/iran-mahsa-amini-death-widespread-protests-intl-hnk/index.html>
- Katzman, K. (2017). Iran's Foreign and Defense Policies. *Congressional Research Service*. <https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44017.pdf>

- Lacroix, S. (2013). Saudi Arabia and the Limits of Post-Islamism. In *Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199766062.003.0010>
- McGrath, M. (2022). *Mahsa Amini: The Spark That Ignited A Women-Led Revolution*. Forbes. <https://www.forbes.com/sites/maggiemcgrath/2022/12/06/mahsa-amini-the-spark-that-ignited-a-women-led-revolution/?sh=4c0f3c745c3d>
- Merdeka. (2020). *Pangeran Muhammad bin Salman, Penangkapan Keluarga Kerajaan & Kursi Kekuasaan*. Merdeka. <https://www.merdeka.com/dunia/pangeran-muhammad-bin-salman-penangkapan-keluarga-kerajaan-kursi-kekuasaan.html>
- Merlyn Thomas, V. V. (2022). *Neom: What's the green truth behind a planned eco-city in the Saudi desert?* - BBC News. BBC. <https://www.bbc.com/news/blogs-trending-59601335>
- Mohammed al-Ragawi, Mohamed Amin, and M. A. (2021). *How US bribed Arab states to normalize ties with Israel*. <https://www.aa.com.tr/en/politics/how-us-bribed-arab-states-to-normalize-ties-with-israel/2108054>
- Muhaimin. (2020). *Arab Saudi Tangkap Adik Raja Salman dan Eks Putra Mahkota*. Sindonews. <https://international.sindonews.com/berita/1548661/43/arab-saudi-tangkap-adik-raja-salman-dan-eks-putra-mahkota>
- Muhaimin. (2023). *Iran dan Arab Saudi Berdamai setelah 7 Tahun Bermusuhan*. Sindonews. <https://international.sindonews.com/read/1043795/43/iran-dan-arab-saudi-berdamai-setelah-7-tahun-bermusuhan-1678460614>
- NEOM. (2017). *NEOM: Made to Change*. NEOM. <https://www.neom.com/en-us>
- Permana, R. H. (2020). *Timeline Gejolak Arab Saudi Menuju Modernisasi*. Detikcom. <https://news.detik.com/berita/d-5171123/timeline-gejolak-arab-saudi-menuju-modernisasi>
- Podeh, E. (2018). Saudi Arabia and Israel: From secret to public engagement, 1948-2018. *Middle East Journal*, 72(4), 563–586. <https://doi.org/10.3751/72.4.12>
- Povey, T. (2015). The Rise of Social Movements in Iran since the 1990s. In *Social Movements in Egypt and Iran* (pp. 72–96). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9781137379009_4
- Rayhan Uddin. (2023). *Neom: New satellite images show progress of Saudi Arabia's "The Line"*. Middle East Eye. <https://www.middleeasteye.net/news/saudi-arabia-neom-line-satellite-images-progress-construction>
- Rosyad Alfikri, L., Sahide, A., & Timur Tengan, K. (2022). Post Islamisme : Telaah Politik Turki Modern Era Erdogan. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, XII(1), 49–60.
- Rumman, M Abu. (2018). Post-Islamism: A New Phase or Ideological Delusions. In *Amman: Friedrich Ebert Stiftung.[Google Scholar]*.

- Rumman, Mohammad Abu. (2018). *Post-Islamism A New Phase or Ideological Delusions?*
- Samur, Z. O. (2008). *Civil Society in Iran*. Middle East Technical University.
- Sandria, F. (2021). *Dear Pangeran MBS, Ekonomi Arab Saudi Mau Dibawa ke Mana?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211026071949-17-286490/dear-pangeran-mbs-ekonomi-arab-saudi-mau-dibawa-ke-mana>
- Shahibzadeh, Y. (2016). *Islamism and Post-Islamism in Iran, An Intellectual History*. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-57825-9>
- Sinani, B. (2022). Post-Salafism: Religious Revisionism in Contemporary Saudi Arabia. *Religions*, 13(4). <https://doi.org/10.3390/rel13040340>
- Somantri, G. R. (2005). *Memahami Metode Kulitatif*. FISIP UI.
- Sorongon, T. P. (2021). “Hilang” Raja Salman Jadi Sorotan, Segera Turun Takhta? CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211217113541-4-300009/hilang-raja-salman-jadi-sorotan-segera-turun-takhta>
- Sulistiyawati, L. (2021). *AS Ajak Lebih Banyak Negara Arab Normalisasi Hubungan Israel*. Republika. <https://republika.co.id/berita/qzpw2366/as-ajak-lebih-banyak-negara-arab-normalisasi-hubungan-israel>
- Suryakuumah, I. (2023). *Arab Saudi Tangkap Ulama Ternama, Diduga karena Kritik Konser Musik*. Inilah.Com. <https://www.inilah.com/arab-saudi-tangkap-ulama-ternama-diduga-karena-kritik-konser-musik>
- Sutardi, D. (2022). *Tegas! Pengeran Mbs Sebut Wahabi Bakal Jadi Sejarah di Arab Saudi, Mau Dihapus?* Disway. <https://disway.id/read/665351/tegas-pengeran-mbs-sebut-wahabi-bakal-jadi-sejarah-di-arab-saudi-mau-dihapus>
- Syahriyanto, M. (2020). *Berulah Lagi, MBS Kali Ini Tangkapi Para Ulama Saudi*. Warta Ekonomi. <https://wartaekonomi.co.id/read303603/berulah-lagi-mbs-kali-ini-tangkapi-para-ulama-saudi>
- Tezcür, G. M. (2008). *Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn*. By Asef Bayat. Stanford: Stanford University Press, 2007. Xxi + 291 pp. \$55.00 Cloth, \$21.95 Paper. *Politics and Religion*, 1(1), 148–150. <https://doi.org/10.1017/s1755048308000084>
- Umam, K. (2022). Rivalitas Arab Saudi, Iran, dan Israel di Kawasan Timur Tengah. *Populika*, 10(2), 1–10. <https://doi.org/10.37631/populika.v10i2.509>
- Vahabzadeh P. (2017). *Iran's Struggles for Social Justice, Economics, Agency, Justice, Activism* (P. Vahabzadeh (ed.)). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-44227-3>
- Wafi, M. (2021). THE CONFRONTATION OF POP CULTURE AND REVOLUTION: IRAN CASE. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 17(2), 28–36. <https://doi.org/10.24042/tps.v17i2.12617>

- Wirachmi, A. (2022). *Aisha Al Muhajiri, Ulama Perempuan Arab Saudi yang Ditangkap Pemerintah*. Sindonews. <https://international.sindonews.com/read/748687/43/aisha-al-muhajiri-ulama-perempuan-arab-saudi-yang-ditangkap-pemerintah-1650438256>
- Wirawan, M. K. (2020). *Mengapa Negara-negara Arab Kini secara Resmi Mengakui Israel?* Kompas. <https://www.kompas.com/global/read/2020/12/16/070000470/mengapa-negara-negara-arab-kini-secara-resmi-mengakui-israel-?page=all>
- Yilmaz, I. (2011). *AK Party Between Post-Islamism and Non-Islamism: A Critical Analysis of the Turkish Islamism's Transformation*. Available at SSRN 1771905. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1771905